



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN II TA. 2024

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu Triwulan II Tahun 2024 dapat terlaksana.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada bagian monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dan berkala. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi diperlukan dalam proses perencanaan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah secara tepat waktu dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga semua program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Disamping itu Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026.

Dengan disusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas pencapaian kinerja yang telah dicapai dalam menjaga Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu dan kiranya dapat memberikan manfaat serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas kinerja di BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Putussibau, 30 Agustus 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730102 199802 1 008

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Diagram	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Sasaran	2
C. Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja	3
D. Format Laporan Kinerja	3
E. Penyampaian Laporan Kinerja.....	4
F. Pengukuran Kinerja.....	4
G. Indikator Kinerja	4
H. Indikator Kinerja Utama.....	4
I. Pengumpulan Data Kinerja.....	5
J. Sistematika Laporan.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Indikator Kinerja Utama (IKU)	6
B. Perjanjian Kinerja.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Capaian Kinerja	10
BAB IV PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran Dan Rekomendasi	43

Daftar Tabel

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu.....	8
Tabel 2 Skala Pengukuran Ordinal	10
Tabel 3 Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis	12
Tabel 4 Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Program.....	14
Tabel 5 Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Kegiatan.....	23
Tabel 6 Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan.....	28

Daftar Diagram

Diagram 1 Realisasi berdasarkan Program	45
Diagram 2 Realisasi berdasarkan Kegiatan	46
Diagram 3 Realisasi berdasarkan Sub Kegiatan.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam mewujudkan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten KapuasHulu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten KapuasHulu memiliki peran sebagai penyusun kebijakan/pengambil keputusan, koordinator kegiatan pembangunan dan administrator di bidang perencanaan. Dokumen- dokumen perencanaan yang dihasilkan akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan daerah dalam menyusun rencana kerja masing-masing dan sebagai dasar merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Peraturan Presiden ini mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyampaikan Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 serta pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran yang dikelolanya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu merupakan rangkaian dua kegiatan yang tidak terpisahkan. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, antara lain dilakukan melalui kegiatan atau pertemuan yang bersifat koordinatif dengan unit kerja/ bidang. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dituntut pengelolaan yang efisien, efektif, akuntabel serta transparan sehingga output dan outcomenya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan tuntutan tersebut serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dibiayai

oleh APBD Kapuas Hulu yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka upaya melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan suatu kebutuhan serta merupakan upaya strategis yang sangat menentukan keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memfokuskan pada efisiensi, efektifitas dan dampak yang dirasakan (impact).

Pelaksanaan monitoring menghasilkan informasi tentang kondisi riil pembangunan di masyarakat sehingga dapat dijadikan bahan masukan dan dasar pengambilan keputusan atau kebijakan tentang program dan kegiatan di tahun anggaran berikutnya. Sehingga program dan kegiatan pembangunan kedepannya sudah sesuai dengan dokumen perencanaan dan kebutuhan masyarakat Kapuas Hulu.

B. TUJUAN DAN SASARAN UMUM

Pelaksanaan monitoring bertujuan untuk :

1. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;
2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya pemecahan yang akan dan telah dilakukan;
3. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan khususnya berkaitan dengan fungsi pelaksanaan program kegiatan bagi masyarakat dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

Sedangkan sasaran dari monitoring adalah sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan secara berkelanjutan mengenai pencapaian indikator kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan;
- 2) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun Anggaran 2024 agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

- 3) Memberikan rekomendasi dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dan upaya-upaya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah agar dapat dicapai pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien;
- 4) Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil pemantauan.

C. PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah terdiri dari :

1. Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari pelaporan kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. FORMAT LAPORAN KINERJA

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

E. PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA

Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

F. PENGUKURAN KINERJA

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

G. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

H. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja

yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

I. PENGUMPULAN DATA KINERJA

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

J. SISTEMATIKA LAPORAN

1. BAB I PENDAHULUAN;
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA;
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA;
4. BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan diukur dengan menggunakan alat berupa indikator kinerja. Indikator kinerja menjadi rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan atau belum.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah dicapai selama periode pembangunan.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021-2026 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan

berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan.

B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu membuat dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala Bappeda untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah membuat penetapan kinerja tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada, dan telah dilakukan revisi berdasarkan assistensi MenPAN RB,

yang mana pada tahun 2024 ini ada 4 (empat) Sasaran Strategis dan ada 4 (empat) Indikator Kinerja Utama.

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu tersebut dapat dilihat pada table 1 dibawah ini.

Tabel 1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	Baik
2	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD	Persen	75,2
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	Persen	100
4	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP BAPPEDA	Predikat	A

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menpertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu:

- (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kontrak kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output*, *outcome* dan *impact* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh karena itu, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja memegang peranan penting dalam sistem akuntabilitas kinerja BAPPEDA, karena merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitasnya. Pengukuran kinerja bappeda tahun 2024 dilakukan atas capaian kinerja berdasarkan kontrak kinerja tahun 2024.

A. Capaian Kinerja

Pada pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \text{REALISASI} / \text{RENCANA} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{INDIKATOR KINERJA} = \text{RENCANA} - (\text{REALISASI} - \text{RENCANA} / \text{RENCANA}) \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing – masing, dilakukan dengan membuat capaian rata – rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan ke dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat pada tabel 2 (dua) dibawah ini :

Tabel 2

SKALA PENGUKURAN ORDINAL

PERSENTASE	PREDIKAT
< 100%	Tidak tercapai
= 100%	Tercapai/Sesuai target
> 100%	Melebihi target

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A. REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Realisasi anggaran dan capaian kinerja sasaran strategis BAPPEDA sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3 (tiga) dibawah ini :

Tabel 3
Realisasi anggaran dan capaian kinerja **SASARAN STRATEGIS** BAPPEDA sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1.437.460.000	533.650.100	21,86	Indeks Kualitas Perencanaan	Predikat	Baik		-
2.	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah	1.678.485.000	608.391.500	16,97	Persentase Pencapaian Indikator Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada RPJMD	Persen	75,2	6,05	8,05
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	150.050.000	74.689.000	12,76	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	Persen	100	-	-
4.	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	6.148.364.520	3.094.944.874	22,69	Predikat SAKIP Bappeda	Predikat	A	-	-
JUMLAH		9.414.359.520	4.311.675.474	46					

Dari tabel 3 (tiga) di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. **4.311.675.474** atau **46 %** dari pagu anggaran sebesar Rp. **9.414.359.520**. Selanjutnya untuk capaian indikator kinerja **sasaran strategis** meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada indikator kinerja Persentase Pencapaian Indikator Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD baru mencapai **8,05 %**.

Untuk indikator kinerja yang lain masih 0 (Nol), hal tersebut bukan merupakan suatu masalah atau adanya kendala dalam pelaksanaannya tetapi melainkan dikarenakan bahwa target kinerja dari indikator kinerja sasaran Capaian PREDIKAT SAKIP BAPPEDA dalam rencana aksi tahun 2024 akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024, indikator kinerja sasaran Indeks Kualitas Perencanaan akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024 dan indikator kinerja sasaran Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti yaitu Triwulan IV Tahun 2024. Sehingga pada Triulan II Tahun 2024 hanya indikator kinerja Persentase Pencapaian Indikator Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bisa dihitung/diukur sesuai hasil Monev RENJA SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

B. REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM

Realisasi anggaran dan capaian kinerja sasaran Program BAPPEDA sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4 (empat) dibawah ini :

Tabel 4
Realisasi anggaran dan capaian kinerja sasaran Program BAPPEDA sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.437.460.000	533.650.100	21,86	Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD	Persen	100	-	-
					Persentase ketersediaan elemen data dan informasi pemerintahan daerah	Persen	100	-	-
					Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RKPD	Persen	75,2	6,05	8,05
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.678.485.000	608.391.500	16,97	1a) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD	Persen	100	100	100

					1b) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RPJMD	Persen	100	25	25
					1c) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJMD	Persen	100	-	-
					2a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RKPD	Persen	100	100	100
					2b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD	Persen	100	25	25

					2c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD	Persen	100	-	-
					3a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	100
					3b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD	Persen	100	25	25
					3c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	-	-

					dengan RKPD				
					4a) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	75,2	5,93	7,89
					4b) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam	Persen	75,2	0,12	0,16
					4c) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	75,2	-	-

3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	150.050.000	74.689.000	12,76	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan untuk penyusunan kebijakan pembangunan	Persen	100	-	-
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.148.364.520	3.094.944.874	22,69	Nilai SAKIP BAPPEDA	Nilai	83	-	-
					Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah	IPKPD	99,01	42,68	43
					Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	Persen	100	100	100
					Persentase pemenuhan data kepegawaian	Persen	100	77,78	78
					Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	Persen	87	-	0

					Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100
					Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Persen	100	-	0
					Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	Persen	100	-	0
	JUMLAH	9.414.359.520	4.311.675.474	46 %			2.270	708	31, 17

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. **4.311.675.474** atau **46%** dari pagu anggaran sebesar Rp. **9.414.359.520,-**. Sedangkan realisasi kinerja program terealisasi sebesar **718 dari 2.270** target yang telah ditetapkan atau sebesar **31,17 %**, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

- 1) Realisasi anggaran Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan pagu Rp. 1.437.460.000 realisasi sebesar Rp. 533.650.100 atau **21,86 %** Sedangkan realisasi kinerja program dengan baru terealisasi sebesar 6,05 atau dengan capaian 8,05%, yaitu indikator kinerja Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RKPD , Sedangkan untuk indikator program lain masih Nol dan akan diukur pada triwulan ke III dan IV tahun 2024.
- 2) Realisasi Anggaran Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pagu Rp. 1.678.485.000 realisasi sebesar Rp. 608.391.500 atau **16,97 %** Sedangkan realisasi kinerja program yang sudah terealisasi antara lain indikator kinerja : 1a) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD dengan capaian 100%; 1b) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RPJMD dengan capaian 25%; 2a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RKPD dengan capaian 100%; 2b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD dengan capaian 25%; 3a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan capaian 100%; 3b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD dengan capaian 25%; 4a)

Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan capaian 5,93%; 4b) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan capaian 0,12%; 4c) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan capaian 0,12%. Sedangkan untuk indikator program lain masih Nol dan akan diukur pada triwulan ke III dan IV tahun 2024.

- 3) Realisasi anggaran Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan pagu Rp. 150.050.000 realisasi sebesar Rp. 74.689.000 atau **12,76%** dengan realisasi indikator kinerja Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan untuk penyusunan kebijakan pembangunan masih 0 (Nol), hal ini dikarenakan indikator tersebut baru dapat diukur kinerjanya pada triwulan ke III dan IV tahun 2024.
- 4) Realisasi anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota dengan pagu Rp. 6.148.364.520 realisasi sebesar Rp. 3.094.944.874 atau **22,69%** dengan realisasi indikator kinerja Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah sebesar 42,68 %, Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD 100 %, Persentase pemenuhan data kepegawaian 77,78, Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah 100 %, Untuk indikator kinerja yang lain masih kosong dikarenakan pencapaian kinerja dilakukan pada triwulan ke III dan IV, sementara untuk indikator nilai SAKIP BAPPEDA di peroleh hasil penilaian oleh APIP Kabupaten/Inspektorat pada Triwulan ke IV.

C. REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Realisasi anggaran dan capaian kinerja Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan Triwulan II (Dua) Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 5 (lima) dibawah ini :

Tabel 5 Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Kegiatan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp1.205.681.000	Rp390.005.100	32,35%	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen	2.791	2.784	100
2	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembanguna n Daerah	Rp84.218.000	55.685.000	66,12%	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	333	333	100
3	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembanguna n Daerah	Rp85.761.000	Rp27.960.000	32,60%	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	28	1	4
4	Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembanguna n Daerah	Rp61.800.000	Rp60.000.000	97,09%	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	1	0	0

5	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembanguna n Manusia	Rp572.225.000	Rp187.703.500	32,80%	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	14	6	43
6	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp404.260.000	Rp142.170.000	35,17%	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	14	4	29
7	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp702.000.000	Rp278.518.000	39,67%	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	14	4	29
8	Kegiatan : Penelitian dan Pengembang an Bidang Penyelenggara an Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp60.000.000	Rp39.887.000	66,48%	Jumlah hasil Kelitbangan bidang Penyelenggara an Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	1	0	0

9	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp90.050.000	Rp34.802.000	38,65%	Jumlah pemanfaatan hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen	1	0	0
10	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp130.885.800	73.962.400	56,51%	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	22	10	45
11	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.014.661.596	2.196.052.996	54,70%	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	574	245	43
12	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.180.000	5.158.000	24,35%	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100
13	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	129.230.500	3.152.000	2,44%	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	9	7	78
14	Kegiatan : Administrasi Umum	714.644.000	302.653.500	42,35%	Jumlah Dokumen administrasi Umum	Dokumen	7	7	100

15	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	968.077.874	455.952.978	47,10%	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2	2	100
16	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.684.750	58.013.000	34,19%	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2	2	100
	JUMLAH	9.414.359.520	4.311.675.474	46%			3.820	3.412	89

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 4.311.675.474 atau 46% dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.414.359.520,-.

Sedangkan untuk capaian indikator kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yaitu sebesar 3.412 dari 3.820 Dokumen yang ditargetkan atau sebesar 89 %.

Adapun kegiatan yang belum terealisasi pada Triwulan II ini sebanyak 3 kegiatan yaitu Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan serta Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan ke 3 (tiga) dan triwulan ke 4 (empat) tahun 2024.

D. REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN

Realisasi Anggaran dan capaian kinerja sasaran Sub Kegiatan BAPPEDA sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6
Realisasi anggaran dan capaian kinerja Sub Kegiatan BAPPEDA sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%				
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	628.882.000	81.135.800	13%	Dokumen	2	0	0
2	Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	149.656.000	82.172.000	55%	Laporan	2	0	0
3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	28.595.000	24.500.000	86%	Laporan	2	2	100
4	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	28.670.000	25.800.000	90%	Laporan	2	2	100
5	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	71.760.000	64.500.000	90%	Laporan	2	0	0

6	Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	100.826.000	85.614.500	85%	Laporan	2780	2780	100
7	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	197.292.000	26.282.800	13%	Laporan	1	0	0
8	Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	39.570.000	13.685.000	35%	Laporan	1	1	100
9	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	44.648.000	42.000.000	94%	Laporan	332	332	100
10	Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	35.856.000	27.960.000	78%	Laporan	1	1	100
11	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala	49.905.000	-	0%	Laporan	27	0	0

	Pelaksanaan Pembangunan Daerah							
12	Sub Kegiatan : Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	61.800.000	60.000.000	97%	Dokumen	1	0	0
13	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99.169.000	35.846.000	36%	Dokumen	1	0	0
14	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.400.000	1.348.000	31%	Dokumen	1	1	100
15	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	58.601.000	2.490.000	4%	Dokumen	4	2	50

	Pemerintahan							
16	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	110.594.000	50.734.000	46%	Laporan	1	0	0
17	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	93.265.000	34.005.500	36%	Dokumen	1	0	0
18	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7.576.000	500.000	7%	Dokumen	1	1	100
19	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	39.229.000	10.554.000	27%	Dokumen	4	2	50

	Pembangunan Manusia							
20	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	159.391.000	52.226.000	33%	Laporan	1	0	0
21	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	56.250.000	34.916.000	62%	Dokumen	1	0	0
22	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9.050.000	3.206.000	35%	Dokumen	1	0	0
23	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	52.000.000	26.772.000	51%	Dokumen	4	2	50

	Perekonomian							
24	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	85.660.000	18.949.000	22%	Laporan	1	0	0
25	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	56.250.000	34.098.000	61%	Dokumen	1	0	0
26	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	9.050.000	3.212.000	35%	Dokumen	1	0	0
27	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	50.300.000	-	0%	Dokumen	4	2	50

28	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	85.700.000	21.017.000	25%	Laporan	1	0	0
29	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	117.518.000	70.068.000	60%	Dokumen	1	0	0
30	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6.919.000	2.082.000	30%	Dokumen	1	0	0
31	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	47.747.000	13.394.000	28%	Dokumen	4	2	50

32	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	178.813.000	58.742.000	33%	Laporan	1	0	0
33	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	117.751.000	50.240.000	43%	Dokumen	1	0	0
34	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7.201.000	2.468.000	34%	Dokumen	1	0	0
35	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	42.697.000	14.900.000	35%	Dokumen	4	2	50

36	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	183.354.000	66.624.000	36%	Laporan	1	0	0
37	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	60.000.000	39.887.000	66%	Laporan	1	0	0
38	Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	90.050.000	34.802.000	39%	Laporan	1	0	0
39	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.872.300,00	13.964.350	83%	Dokumen	4	2	50
40	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.094.000,00	6.658.800	73%	Dokumen	2	2	100
41	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.844.000,00	-	0%	Dokumen	2	1	50
42	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-	14.450.000,00	5.377.750	37%	Dokumen	2	2	100

	SKPD							
43	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.992.000,00	-	0%	Dokumen	2	0	0
44	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.348.000,00	4.695.000	41%	Laporan	3	1	33
45	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.285.500,00	43.266.500	71%	Laporan	7	2	29
46	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.725.987.596,00	2.066.337.996	55%	Orang/bulan	532	228	43
47	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	246.949.000,00	111.034.000	45%	Dokumen	9	3	33
48	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.300.000,00	5.782.000	56%	Dokumen	14	6	43
49	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan	9.224.000,00	7.264.000	79%	Dokumen	1	1	100

	Keuangan Akhir Tahun SKPD							
50	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.779.000,00	4.000.000	34%	Dokumen	1	1	100
51	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.422.000,00	1.635.000	16%	Dokumen	17	6	35
52	Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	532.000	27%	Unit	1	1	100
53	Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.000.000	1.625.000	41%	Dokumen	1	1	100
54	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2.500.000	800.000	32%	Laporan	1	1	100
55	Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.100.000	557.000	27%	Laporan	1	1	100

56	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.040.000	844.000	17%	Laporan	2	2	100
57	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.540.000	800.000	14%	Laporan	1	1	100
58	Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	18.042.500	452.000	3%	Unit	1	1	100
59	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.570.000	-	0%	Paket	1	1	100
60	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.400.000	862.000	16%	Dokumen	1	1	100
61	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.100.000	838.000	27%	Dokumen	1	1	100
62	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12.400.000	1.000.000	8%	Dokumen	4	2	50

63	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.718.000	-	0%	Orang	1	1	100
64	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	8.862.000	89%	Paket	1	1	100
65	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	16.340.000	16%	Paket	1	1	100
66	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.905.000	17.516.500	39%	Paket	1	1	100
67	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/ Material	14.509.000	6.424.000	44%	Paket	1	1	100
68	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	512.630.000	241.709.000	47%	Laporan	1	1	100
69	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	3.800.000	38%	Dokumen	1	1	100

70	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	22.600.000	8.002.000	35%	Dokumen	1	1	100
71	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.281.838	44.429.396	37%	Laporan	1	1	100
72	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	847.796.036	411.523.582	49%	Laporan	1	1	100
73	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.724.750	48.348.000	33%	Unit	1	1	100
74	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.960.000	9.665.000	40%	Unit	1	1	100
	JUMLAH	9.414.359.520	4.311.675.474	46%		3.820	3.412	89

Dari tabel 6 (enam) di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 4.311.675.474 atau 46% dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.414.359.520. Sedangkan untuk capaian indikator kinerja Sub kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yaitu sebesar 3.412 dari 3.820 Dokumen yang ditargetkan atau sebesar 89 %.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang telah dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yaitu sebesar **Rp. 4.311.675.474** atau 46% dari pagu anggaran sebesar **Rp. 9.414.359.520** dengan rata-rata capaian indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

- 1) Rata – rata capaian indikator kinerja Sasaran Strategis **8,05%**
- 2) Rata - rata capaian indikator kinerja Program **31,17%**;
- 3) Rata - rata capaian indikator kinerja Kegiatan **89 %**;
- 4) Rata - rata capaian indikator kinerja Sub Kegiatan **89 %**.

B. SARAN

Saran perbaikan yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan Kinerja pada Triwulan berikutnya antara lain sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan percepatan pencapaian target kinerja terutama untuk percepatan pencapaian kinerja Sasaran Strategis dan capaian target kinerja Program ;
- 2) Segera melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Eksternal terhadap Organisasi Perangkat Daerah;
- 3) Mempercepat pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target kinerja pada rencana aksi Tahun 2024.

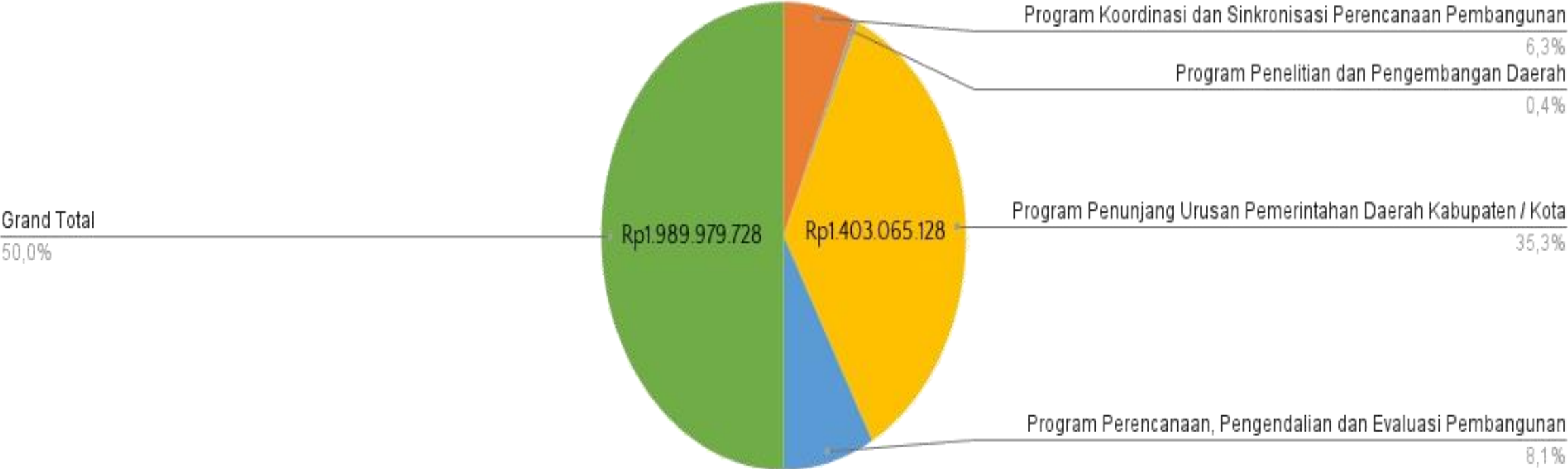
Putussibau, 30 Agustus 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

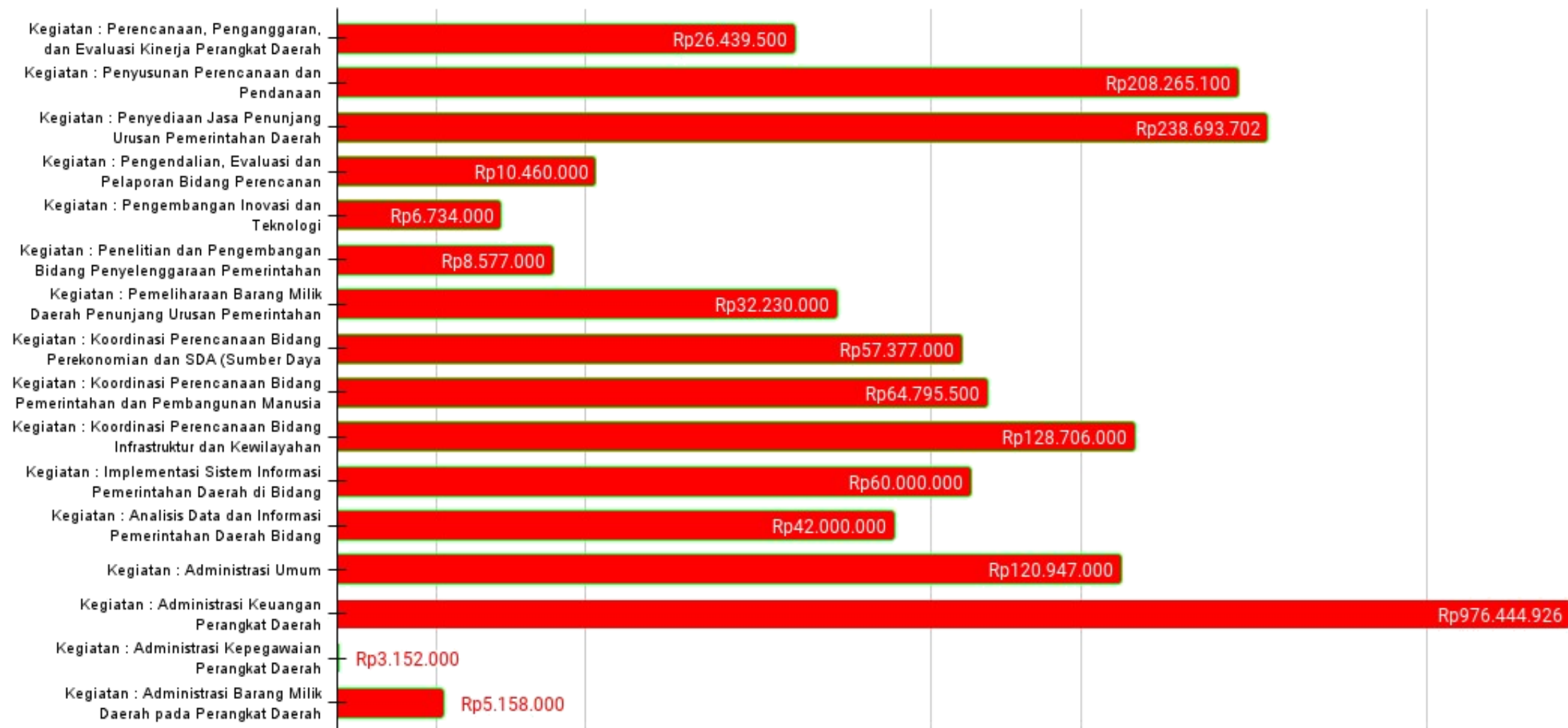


Ambrosius Sadau, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199802 1 008

REALISASI BERDASARKAN PROGRAM



REALISASI BERDASARKAN KEGIATAN



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULLU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I.Panjaitan No.22 A Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,
Laman bappeda.kapuasbukab.go.id, Pos-el bappeda@kapuasbukab.go.id

Saya, AMBROSIOUS SADAU, S.H., M.Si., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta dan menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan esame pegawai dilindungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyelenggaraan peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi kosekuensinya.

Putussibau, 7 Februari 2024

Menyaksikan,
BUPATI KAPUAS HULLU,



Pembuat pernyataan,
KEPALA BAPPEDA,

AMBROSIOUS SADAU, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMBROSIUS SADAU. S.H., M.Si
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FRANSISKUS DIAAN
Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BUPATI KAPUAS HULU,



FRANSISKUS DIAAN

Putussibau, 7 Februari 2024

Pihak pertama,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Baik
2	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada RPJMD	75,2 %
3	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100 %
4	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP BAPPEDA	A

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.183.466.682	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.467.510.000	APBD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.478.485.000	APBD
4	Program Penelitian dan Pengembangan	120.000.000	APBD
JUMLAH		9.249.461.682	

Pihak Kedua,

BUPATI KAPUAS HULU,


FRANSISKUS DIAAN

Putussibau, 7 Februari 2024

Pihak pertama,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KAPUAS HULU,


AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

**SEKRETARIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDY, S.T., M.T.
Jabatan : Sekertaris BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA




AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008



Putussibau, 1 April 2024

Pihak Pertama,
Sekretaris BAPPEDA



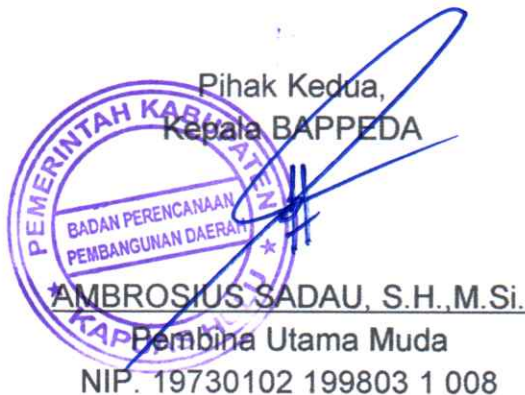
DEDY, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19750506 200401 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

No	Sasaran Program	Indikator	Target
1	Meningkatnya manajemen tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BAPPEDA	1. Nilai SAKIP BAPPEDA 2. Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah 3. Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD 4. Persentase pemenuhan data kepegawaian 5. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal 6. Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah 7. Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah 8. Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	1. 83 2. 99,01 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 87 6. 100 % 7. 100 % 8. 100 %

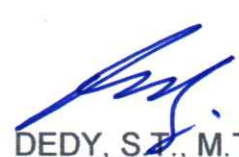
No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.183.466.682
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.633.800
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.104.763.758
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.500.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	123.805.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	734.194.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	903.285.374
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.284.750
	Jumlah	6.183.466.682

Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA



AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 1 April 2024
Pihak Pertama,
Sekretaris BAPPEDA



DEDY, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19750506 200401 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKA FITTRIADIE SYAFAAT, S.Kom., M.A.P.
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 12 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA



AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Pihak pertama,
Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan

EKA FITTRIADIE SYAFAAT, S.Kom., M.A.P.
Penata Tk.I
NIP. 198307122011011004

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, partisipatif dan aplikatif	1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD; 2. Persentase ketersediaan elemen data dan informasi pemerintahan daerah	1. 100 % 2. 100 %
2	Meningkatnya Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RKPD	75,2 %
3	Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan untuk penyusunan kebijakan pembangunan	100 %

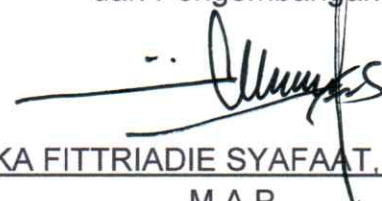
No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.467.510.000
1.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.081.328.000
1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	154.246.000
1.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	110.486.000
1.4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	121.450.000
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	120.000.000
2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	60.000.000
2.2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	60.000.000
	Jumlah	1.587.510.000

Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA



AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 12 Februari 2024
Pihak pertama,
Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan



EKA FITRIADIE SYAFAAT, S.Kom.,
M.A.P.
Penata Tk.I
NIP. 198307122011011004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KRISTOFORUS ORLANDO, S.IP., M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 1 April 2024

Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA



AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Pihak pertama,
Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan
Budaya BAPPEDA

KRISTOFORUS ORLANDO, S.IP., M.Si.
Penata
NIP. 19900923 201402 1 003

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan perangkat daerah yang berkualitas	1. Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD; 2. Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RKPD; 3. Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 4. Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 75,2 %

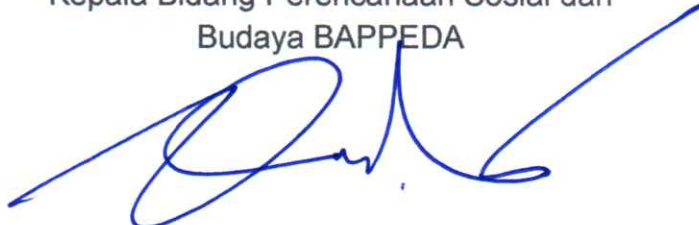
No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.478.485.000
1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	372.225.000
	Jumlah	372.225.000

Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA



AMBROSIOUS SADAU, S.H., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 1 April 2024
 Pihak pertama,
 Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan
 Budaya BAPPEDA



KRISTOFORUS ORLANDO, S.IP., M.Si.
 Penata
 NIP. 19900923 201402 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PERENCANAAN FISIK, PRASARANA, DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS DARMANTA, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, dan Pengembangan Wilayah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 1 April 2024

Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA

Pihak pertama,
Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana
dan Pengembangan Wilayah


AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008


AGUS DARMANTA, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19700809 200003 1 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PERENCANAAN FISIK, PRASARANA, DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan perangkat daerah yang berkualitas	1. Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJMD; 2. Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD; 3. Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; 4. Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 75,2 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.478.485.000
1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	702.000.000
	Jumlah	702.000.000

Putussibau, 1 April 2024

Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA

Pihak pertama,
Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana
dan Pengembangan Wilayah



AMBROSIOUS SADAU, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

AGUS DARMANTA, S.T.,M.T.
Pembina
NIP. 19700809 200003 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : C.JIMMY.J.SP.,M.Eng.

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

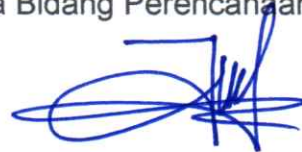
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA



AMBROSIUS SADAU, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 12 Februari 2024
Pihak pertama,
Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian



C.JIMMY.J.SP.,M.Eng.
Pembina
NIP. 197607302005021001

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan perangkat daerah yang berkualitas	1. Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD; 2. Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RKPD; 3. Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 4. Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 75,2 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.478.485.000
1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam	404.260.000
Jumlah		404.260.000

Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA



AMBROSIOUS SADAU, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 12 Februari 2024

Pihak pertama,
Kepala Bidang Perencanaan
Perekonomian

C.JIMMY.J. SP., M.Eng.
Pembina
NIP. 197607302005021001

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024
SEKRETARIAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				TW I	TW II	TW III	TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= 5+6+7+8	(10)=(9/4*100)%	(11)	(12)
	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP BAPPEDA	A							akan dinilai pd thn berikutnya	

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TRIWULAN II TAHUN 2024
SEKRETARIAT**

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%PENCAPAIAN TARGET	KET
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BAPPEDA		83			
		Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah		99,01	43	43	
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD		100	100	100	
		Persentase pemenuhan data kepegawaian		100	78	78	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal		87		-	
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah		100	100	100	
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik		100		-	
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	22	10	45	
1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	2	50	
2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	100	
3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	1	50	
4	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100	
5	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
6	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	3	1	33	

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
7	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	2	29	
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	574	245	43	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	532	228	43	
2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	9	3	33	
3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	14	6	43	
4	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100	
5	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	100	
6	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	17	6	35	
3	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100	
1	Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Unit	1	1	100	
2	Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100	
3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	100	

4	Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100	
5	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	100	
6	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100	
4	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	9	7	78	
1	Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	1	100	
2	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100	
3	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100	
4	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100	
5	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	2	50	
6	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	1	100	
5	Kegiatan : Administrasi Umum	Jumlah Dokumen administrasi Umum	Dokumen	7	7	100	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	
3	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100	
4	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	100	
5	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100	
6	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100	

7	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	100	
6	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2	2	100	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100	
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100	
7	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2	2	100	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	100	
2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	100	
	JUMLAH			623	280	45	

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 31 Juli 2024
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

Dedy, S.T.,M.T
NIP. 19750506 200401 001

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2024
BIDANG BIDANG PENGENDALIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%PENCAPIAN TARGET	KET
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100%	8
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD	Persentase	100			SESUAI RENAksi AKAN DILKASANAKAN TW BRKTNYA
		Persentase ketersediaan elemen data dan informasi pemerintahan daerah	Persentase	100			SESUAI RENAksi AKAN DILKASANAKAN TW BRKTNYA
		Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RKPD	Laporan	75,2			SESUAI RENAksi AKAN DILKASANAKAN TW BRKTNYA
1	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen	2.791	2.784	100	
1	Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
2	Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	2	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	2	100	
4	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	2	2	100	
5	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
6	Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	2.780	2.780	100	
7	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	1	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
2	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	333	333	100	

1	Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1	1	100	
2	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	332	332	100	
3	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	28	1	4	
1	Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	1	100	
2	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	27	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
4	Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	1	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
1	Sub Kegiatan : Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%PENCAPAIAN TARGET	KET
	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan untuk penyusunan kebijakan pembangunan	Persen	100%			
5	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	1	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
1	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
6	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pemanfaatan hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen	1	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi

1	Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
JUMLAH				3.155	3.118	99	

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 31 Juli 2024
Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

Eka Fitriadie Syafaat, S.Kom., M.A.P
NIP. 19830712 201101 1 004

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2024

BIDANG PERENCANAAN FISIK, PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%PENCAPAIAN TARGET	KET
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100%	8
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1c) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJMD	Laporan	100			
		2c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD	Laporan	100			
		3c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD	Laporan	100			
		4c) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	75,2			
1	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	14	4	29	
1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
2	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	2	50	
4	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
5	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan	1	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi

6	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
7	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	4	2	50	
8	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
JUMLAH				14	4	29	

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 31 Juli 2024
Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

Agus Darmanta, S.T.,M.T
NIP. 19700809 200003 1 005

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024
BIDANG PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				TW I	TW II	TW III	TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= 5+6+7+8	(10)=(9/4*100)%	(11)	(12)
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Baik							Proses pengerjaan baru tahap awal;	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah	Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD	75,2	5,93				5,93	7,89	Beberapa Perangkat Daerah yang belum menyampaikan data pencapaian realisasi kinerja indikator sasaran;	Meningkatkan koordinasi perencanaan;
										Masih kurangnya tingkat koordinasi.	Mendorong Perangkat Daerah untuk menyediakan data dan informasi yang akurat sesuai tupoksinya.

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2024
 BIDANG PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%PENCAPAIAN TARGET	KET
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$	8
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1a) Presentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD;	Laporan	100	100	100	
		2a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RKPd;	Laporan	100	100	100	
		3a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;	Laporan	100	100	100	
		4a) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.	Laporan	75,20	5,9	8	
1	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	14	6	43	
1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPd)	Dokumen	1	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
2	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Laporan	1	1	100	
3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan	Laporan	4	2	50	
4	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPd/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi

5	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
6	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	1	100	
7	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	2	50	
8	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
JUMLAH				14	6	43	

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 31 Juli 2024
Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

Kristoforus Orlando, S.IP., M.Si.
NIP. 19900923 201402 1 003

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024
BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				TW I	TW II	TW III	TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= 5+6+7+8	(10)=(9/4*100)%	(11)	(12)
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Baik							Proses pengerjaan baru tahap awal;	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah	Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD	75,2					0,12	0,16	Beberapa Perangkat Daerah yang belum menyampaikan data pencapaian realisasi kinerja indikator sasaran;	Meningkatkan koordinasi perencanaan;
										Masih kurangnya tingkat koordinasi.	Mendorong Perangkat Daerah untuk menyediakan data dan informasi yang akurat sesuai tupoksinya.

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2024

BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%PENCAPAIAN TARGET	KET
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100%	8
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1b) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RPJMD	Laporan	100			
		2b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPd	Laporan	100			
		3b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPd	Laporan	100			
		4b) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam	Laporan	75,2	0,12	0,16	
1	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	14	4	29	
1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	1	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
2	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	4	2	50	
4	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi

5	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
6	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	1	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
7	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4	2	50	
8	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	0	0	Masih dalam Proses Penyusunan Dokumen Sesuai dengan Rencana Aksi
JUMLAH				14	4	29	

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 31 Juli 2024
Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

C.Jimmy.J.SP.,M.Eng.
NIP. 19760730 200502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I Panjaitan, No. 22 A Putussibau 78716 (0567)21071

Laman bappeda.kapuashulukab.go.id

Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id

BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
PERIODE TRIWULAN II T.A 2024

Pada Hari ini Jumat, 30 Agustus 2024 bertempat di ruang rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si
NIP : 19730102 199803 1 008
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

2. Nama : Dedy, S.T., M.T.
NIP : 19750506 200401 1 001
Jabatan : Sekretaris BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

Telah dilakukan pengukuran kinerja terhadap realisasi pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 1 April sampai dengan 31 Juni 2024 (Triwulan II T.A. 2024) dengan hasil sebagai berikut :

I. ALOKASI APBD TAHUN 2024

Alokasi APBD Tahun 2024 pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. **6.148.364.520,-** (*Enam Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*) Anggaran tersebut untuk membiayai 1 (Satu) Program dengan 7 (Tujuh) Kegiatan .

II. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran belanja daerah Tahun 2024 Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. **6.148.364.520,-** (*Enam Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*) dengan realisasi sampai dengan akhir Triwulan II sebesar Rp. **3.094.944.874,-** (*Tiga Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) atau **50,34%**.

III. PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian Kinerja atau Kinerja Fisik Kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2024 pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 45 %.

Untuk kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan di Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada prinsipnya tidak ada, karena semua proses berjalan berdasarkan Rencana Aksi yang telah di rumuskan. Adapun rencana aksi tersebut dapat dilihat pada link dengan alamat <https://s.id/29ain>.

Demikian Berita Acara ini di buat untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Kepala BAPPEDA

Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si

NIP. 19730102 199803 1 008

Sekretaris BAPPEDA,

Kab. Kapuas Hulu,



Dedy, S.T., M.T.

NIP. 19750506 200401 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I Panjaitan, No. 22 A Putussibau 78716 (0567)21071

Laman bappeda.kapuashulukab.go.id

Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id

BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
PERIODE TRIWULAN II T.A 2024

Pada Hari ini Jumat, 30 Agustus 2024 bertempat di ruang rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si
NIP : 19730102 199803 1 008
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu
2. Nama : Eka Fitriadie Syafaat, S.Kom., M.A.P.
NIP : 19830712 201101 1 004
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan

Telah dilakukan pengukuran kinerja terhadap realisasi pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja pada Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 1 April sampai dengan 31 Juni 2024 (Triwulan II T.A. 2024) dengan hasil sebagai berikut :

I. ALOKASI APBD TAHUN 2024

Alokasi APBD Tahun 2024 pada Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar **Rp1.587.510.000,-** (*Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*). Anggaran tersebut untuk membiayai PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH sebesar **Rp1.437.460.000,-** (*Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu rupiah*) dan untuk membiayai PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH sebesar **Rp150.050.000,-** (*Seratus Lima Puluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*).

II. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Belanja Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 Bidang Pengendalian, Penelitian, dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sudah terealisasi sebesar Rp. **Rp533.650.100,-** (*Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Rupiah*) atau **37,12%** dari pagu sebesar **Rp1.437.460.000,-** (*Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu rupiah*). Sedangkan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sudah terealisasi sebesar **Rp74.689.000,-** (*Tujuh Puluh Empat*

Juta Enam Ratus Delapan Puluh sembilan Ribu Rupiah) atau **49,78%** dari pagu sebesar Rp150.050.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

III. PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian Kinerja atau Kinerja Fisik Kegiatan sampai triwulan II Tahun 2024 pada Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar **99%**, sedangkan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 0% (*Nol %*)

Untuk kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada prinsipnya tidak ada, karena semua proses berjalan berdasarkan Rencana Aksi yang telah di rumuskan. Adapun rencana aksi tersebut dapat dilihat pada link dengan alamat <https://s.id/29ain>.

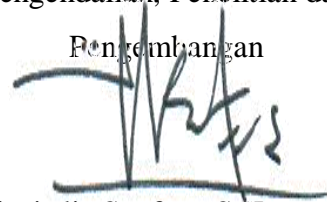
Demikian Berita Acara ini di buat untuk di gunakan sebagai mana mestinya.

Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si
NIP. 19730102 199803 1 008

Kepala Bidang
Pengendalian, Penelitian dan
Pengembangan



Eka Fitriadi Syafaat, S.Kom., M.A.P
NIP. 19830712 201101 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I Panjaitan, No. 22 A Putussibau 78716 (0567)21071

Laman bappeda.kapuashulukab.go.id

Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id

BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
PERIODE TRIWULAN II T.A 2024

Pada Hari ini Jumat, 30 Agustus 2024 bertempat di ruang rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si
NIP : 19730102 199803 1 008
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

2. Nama : Kristoforus Orlando, S.IP., M.Si.
NIP : 19900923 201402 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya

Telah dilakukan Pengukuran Kinerja terhadap realisasi pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja pada Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 1 April sampai dengan 31 Juni 2024 (Triwulan II T.A. 2024) dengan hasil sebagai berikut :

I. ALOKASI APBD TAHUN 2024

Alokasi APBD Tahun 2024 pada Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. **Rp572.225.000,-** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), anggaran tersebut untuk membiayai PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (*Kegiatan* : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia).

II. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya pada Program PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH sampai dengan Triwulan II T.A. 2024 adalah sebesar Rp. **Rp187.703.500,-** (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*) atau **32,80%**.

III. PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian Kinerja atau Kinerja Fisik Kegiatan sampai triwulan II Tahun 2024 pada Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar **43 %**.

Untuk kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada prinsipnya tidak ada, karena semua proses berjalan berdasarkan Rencana Aksi yang telah di rumuskan. Adapun rencana aksi tersebut dapat dilihat pada link dengan alamat <https://s.id/29ain>.

Demikian Berita Acara ini di buat untuk di gunakan sebagai mana mestinya.

Kepala BAPPEDA

Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H., M.Si
NIP. 19730102 199803 1 008

Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan

Budaya Kab. Kapuas Hulu,

Kristoforus Orlando, S.IP., M.Si.
NIP. 19900923 201402 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I Panjaitan, No. 22 A Putussibau 78716 (0567)21071

Laman bappeda.kapuashulukab.go.id

Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id

BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
PERIODE TRIWULAN II T.A 2024

Pada Hari ini Jumat, 30 Agustus 2024 bertempat di ruang rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si
NIP : 19730102 199803 1 008
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

2. Nama : C.Jimmy.J.SP.,M.Eng.
NIP : 197607302005021001
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian

Telah dilakukan pengukuran kinerja terhadap realisasi pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 1 April sampai dengan 31 Juni 2024 (Triwulan II T.A. 2024) dengan hasil sebagai berikut :

I. ALOKASI APBD TAHUN 2024

Alokasi APBD Tahun 2024 pada Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. **404.260.000,-** (*Empat Ratus Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*) Anggaran tersebut untuk membiayai PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (*Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam*).

II. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Belanja Daerah sampai dengan Triwulan II T.A. 2024 pada Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan nama PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (*Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam*) adalah sebesar Rp. **Rp142.170.000,-** (*Seratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) atau **35,17%**.

III. PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian Kinerja atau Kinerja Fisik Kegiatan sampai triwulan II Tahun 2024 pada Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar **29%**.

Untuk kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada prinsipnya tidak ada. Semua proses berjalan berdasarkan Rencana Aksi yang telah di rumuskan. Adapun rencana aksi tersebut dapat dilihat pada link dengan alamat <https://s.id/29ain>.

Demikian Berita Acara ini di buat untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Kepala BAPPEDA

Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si
NIP. 19730102 199803 1 008

Kepala Bidang Perencanaan
Perekonomian

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

C.Jimmy.J.SP..M.Eng
NIP. 197607302005021001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I Panjaitan, No. 22 A Putussibau 78716 (0567)21071

Laman bappeda.kapuashulukab.go.id

Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id

BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
PERIODE TRIWULAN II T.A 2024

Pada Hari ini Jumat, 30 Agustus 2024 bertempat di ruang rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si
NIP : 19730102 199803 1 008
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

2. Nama : Agus Darmanta, S.T.,M.T.
NIP : 19700809 200003 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Fispra dan Pengembangan Wilayah

Telah dilakukan Pengukuran Kinerja terhadap realisasi pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja pada Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 1 April sampai dengan 31 Juni 2024 (Triwulan II T.A. 2024) dengan hasil sebagai berikut :

I. ALOKASI APBD TAHUN 2024

Alokasi APBD Tahun 2024 pada Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. **702.000.000,-** (*Tujuh Ratus Dua Juta Rupiah*), anggaran tersebut untuk membiayai PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (*Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*).

II. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (*Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*) sampai dengan Triwulan II T.A. 2024 adalah sebesar Rp. **278.518.000,-** (*Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*) atau **39,67%**.

III. PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian Kinerja atau Kinerja Fisik Kegiatan sampai triwulan II Tahun 2024 pada Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar **29 %**.

Untuk kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada prinsipnya tidak ada, karena semua proses berjalan berdasarkan Rencana Aksi yang telah di rumuskan. Adapun rencana aksi tersebut dapat dilihat pada link dengan alamat <https://s.id/29ain>.

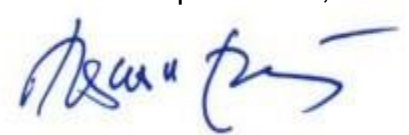
Demikian Berita Acara ini di buat untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si
NIP. 19730102 199803 1 008

Kepala Bidang Perencanaan Fisik,
Prasarana dan Pengembangan Wilayah
Kab. Kapuas Hulu,



Agus Darmanta, S.T.,M.T.
NIP. 19700809 200003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I.Panjaitan No.22 A Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,
Laman bappeda.kapuashulukab.go.id, Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id

NOTULEN RAPAT

- Tanggal : 30 Agustus 2024
Pukul : 09.00 – selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala BAPPEDA
Acara : Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2024
Pimpinan Rapat : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peserta Rapat : 1. Sekretaris Badan;
2. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian;
4. Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
5. Kasubbag Program;
6. JF di lingkungan BAPPEDA;
7. Staf di lingkungan BAPPEDA.

Hasil rapat :

1. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan II tahun 2024 atas pelaksanaan program/kegiatan pada masing – masing bidang dan sekretariat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu, dimana dari 4 (Empat) Program yang terjabarkan dalam Renja BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, capaian Kinerja sangat Sudah Tinggi (T), yaitu sebesar 89% sedangkan Realisasi Anggaran mencapai 46%;
2. Agar setiap unit kerja/bidang yang ada dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu menyampaikan Pengukuran Kinerja (Kurkin) ke Sub Bagian Program tiap akhir triwulan, hal ini perlu dilakukan mengingat masih terdapat beberapa unit kerja/bidang di lingkungan BAPPEDA yang hasil pengukuran kinerja/capaian kinerjanya masih dalam proses karena masih menunggu data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diampu. Upaya yang perlu dilakukan adalah mengkonfirmasi kembali ke OPD yang bersangkutan agar segera menyampaikan data dukung sehingga mempermudah dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kedepannya, dengan kata lain setiap unit kerja/bidang yang ada dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu harus mendorong Perangkat Daerah untuk menyediakan data dan informasi yang akurat sesuai tupoksinya mengingat masih

ada beberapa perangkat daerah yang belum menyampaikan data pencapaian realisasi kinerja indikator sasaran;

3. Agar setiap unit kerja/bidang yang ada dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu menyelenggarakan atau melakukan Monitoring dan Evaluasi eksternal terlebih dahulu untuk mendapatkan data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diampu dan selanjutnya baru akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi internal di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu;
4. Mulai tahun ini Monitoring dan Evaluasi lebih ditekankan kepada dokumen Pengukuran Kinerja bukan hanya mengukur serapan anggaran, dengan kata lain skema Monitoring dan Evaluasi tahun ini berbeda dari sebelumnya karena lebih menitikberatkan pada Pengukuran Kinerja;
5. Agar setiap unit kerja/bidang yg ada dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu selalu memperbaharui (update) Standar Operasional Prosedur (SOP) atau menyesuaikan SOP dengan keadaan sekarang sehingga SOP tersebut relevan dengan keadaan terkini;

Demikian Notulen Rapat ini dibuat, agar menjadi bahan/catatan perbaikan pada triwulan selanjutnya.

Notulen,



Andreas Anjas, S.Ak

NIP. 19810815 200012 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I.Panjaitan No.22 A Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,
Laman bappeda.kapuashulukab.go.id, Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Sekretaris dan Kepala Bidang di Lingkungan Bappeda
Kabupaten Kapuas Hulu

Dari : Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu

Tanggal : 10 Juli 2024

Nomor : 000.3.6 / 453 /BAPPEDA/SET-A

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (Satu) Set

Hal : Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Triwulan II Tahun 2024

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Internal Triwulan II Tahun 2024 di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu, untuk itu perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja bagi Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026;
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas mohon bantuan dan kerjasama setiap bidang/unit kerja di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu untuk dapat mengisi **Realisasi Capaian Kinerja** pada **Form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)** pada lampiran surat ini dengan cara menuliskan jumlah satuan pada kolom

realisasi. Satuan yang diisi tersebut dapat berupa Dokumen/Laporan/Berita Acara dan lain sebagainya;

3. Format Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) seperti yang disebutkan pada poin 2 (dua) di atas dapat diunduh pada web dengan alamat : <https://tally.so/r/wLb641>;
4. Apabila dokumen/laporan tersebut belum terealisasi harap memberikan penjelasan pada kolom keterangan;
5. Formulir PKK tersebut disampaikan ke Sub Bagian Program paling lambat tanggal 15 Juli 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
NIP. 19730102 199803 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. D.I Panjaitan No. 22 A Putussibau 78711 (0567) 21071
Website: www.bappeda.kapuashulukab.go.id / e.mail: bappeda@kapuashulu.go.id
Putussibau – Kalimantan Barat

Putussibau, 26 Agustus 2024

Nomor : 000.3.6 / 582 /BAPPEDA/SET-A
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Undangan Monevkin Triwulan II Tahun 2024

Yth. (Daftar terlampir)
di
Putussibau

Dalam rangka mengevaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu dan upaya percepatan pencapaian kinerja Tahun 2024 serta menindaklanjuti Nota Dinas Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 000.3.6 /453/BAPPEDA/SET-A tanggal 10 Juli 2024 tentang permintaan pengisian Form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Triwulan II Tahun 2024 maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Agustus 2024
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Acara : Rapat Monevkin Internal di Lingkungan Bappeda Tw. II Tahun 2024

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,







Ambrosius Sadau, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Lampiran I Surat Nomor : 000.3.6 / 582 / BAPPEDA/SET-A
Tanggal : ..26.. Agustus 2024
Hal : Undangan

DAFTAR UNDANGAN

1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
3. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
4. Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
5. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian

Lampiran II Surat Nomor : 000.3.6 / 582 / BAPPEDA/SET-A
 ALUR / STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MONITORING DAN EVALUASI KINERJA (MONEVKIN) INTERNAL BAPPEDA

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Kepala SKPD	SUBBAG PROGRAM	SEKRETARIS/KABID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala SKPD Membuka acara Rapat MonevKin Internal BAPPEDA					5 Menit		
2	Subbag Program Memaparkan Kurkin / hasil MonevKin Internal BAPPEDA				Renja/Renstra, RKA/DPA, SPJ Fungsional, Kurkin, ev Renja	25 Menit	Laporan Monev	
3	Sekretaris/ Kepala Bidang menanggapi atau memberi masukan atas paparan Kurkin dari Subbag Program				Kurkin /ev renja	10 Menit		
4	Arahan dari Kepala SKPD sekaligus menutup acara Rapat Monev					10 Menit		

Putussibau, 26 Agustus 2024

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Kabupaten Kapuas Hulu



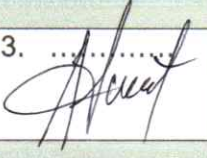
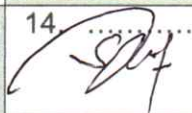



Ambrosius Sadau, S.H., M.Si
 NIP. 19730102 199803 1 008

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
 Tanggal : 30 Agustus 2024
 Waktu : Pukul 09.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Kepala BAPPEDA
 Acara : Rapat Monevkin Triwulan II Tahun 2024

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TTD
1.	Ambrosius Arden	197301021918031002	Kl. Badan.	1. 
2.	DEDY	197505062004011001	SEKRETARIS	2. 
3.	EKA FS	198307122011011004	KASID P3	3. 
4.	Jimmy	197607302005021001	KABID Ekow	4. 
5.	Agus Darmanta	197008092011031005	Kabid Fispro	5. 
6.	Kristoforus Orlando	199009232019021003	Kabid Sosbud	6. 
7.	Pamianus Xuro	198106292003011005	Staff	7. 
8.	MATEUS	197703271977031002	Staff	8.
9.	Angela M.A.	—	Staff	9. 
10.	Yuli Karmilasari	—	Staff	10. 

11.	Andreas Anjas	198108152000121002	Kasubbag program	11. 	
12.	Maurus. Z	-	Staf		12. 
13.	SUPRIADI	-	Staf	13. 	
14.	Syaifulhuda		Staf		14. 
15.	Alam Cahin	198711182015021003	Staf	15. 	
					16.
				17.	
					18.
				19.	
					20.
				21.	
					22.
				23.	
					24.
				25.	

DOKUMENTASI KEGIATAN MONEV II





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA


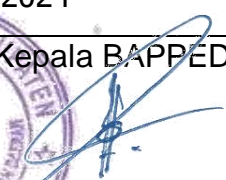
BAPPEDA KAPUAS HULU

Jl D.I.Panjaitan No.22 A Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716

Laman bappeda.kapuashulukab.go.id, Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id



BAPPEDA KAPUAS HULU

 BAPPEDA KAPUAS HULU	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	21 Maret 2024
	Tanggal Revisi	:	-
	Tanggal Pengesahan	:	21 Maret 2024
	Disahkan Oleh		Kepala BAPPEDA  AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si NIP. 19730102 199803 1 008
Nama SOP	Penyusunan Perjanjian Kinerja		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
<ol style="list-style-type: none">Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 75 Tahun 2019 Tentang Juknis SAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.	<ol style="list-style-type: none">Memiliki kewenangan dalam penyusunan Perjanjian kinerjaMemiliki Kemampuan dalam menyusun Perjanjian kinerja		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
<ol style="list-style-type: none">SOP Rapat InternalSOP Pengumpulan Data Kinerja	<ol style="list-style-type: none">RenstraManual Indikator KinerjaRenja Tahun Berkenaan	<ol style="list-style-type: none">DPA Tahun BerkenaanFormat Perjanjian KinerjaPerangkat Komputer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan		
<ol style="list-style-type: none">Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Perjanjian kinerja ini tidak akan berjalan lancar.	<ol style="list-style-type: none">Rumusan rencana program, kegiatan dan anggaran untuk periode satu tahun anggaran		

SOP : PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala Badan	Sekretaris	Kasubag Program	Kabid/JFT/JFU/Subag/Staf	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Memerintahkan penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Tahun Berkenaan (Eselon III dan IV)	MULAI				Dispo surat, PK Kaban	10 Menit	Disposisi surat ke Subag Prog	<1 bulan seterimaDPA
2.	Membuat format penyusunan Perjanjian Kinerja Es III dan IV serta permintaan dokumen pendukungnya sesuai tugas dan fungsi (mandat) masing-masing					RKT, PK Kaban, DPA & IKU	2 Jam	Format Perjanjian kinerja, SOP	RKT=Rencana Kinerja Tahunan
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi Perjanjian Kinerja beserta dokumen pendukungnya kepada Sekretaris, Es III (Kabid (JF), Es IV (Kasubag), JF dan Staf					Format PK, Manual IKU Proses bisnis, Cascading mandat knrja	1 Jam	Format PK, manual IKU, cascading diterima pemilik mandat kinerja	JF dan Staf membantu Es III/IV sesuai Tusi (untuk SKP)
4.	Mengundang Kepala Bappeda, Sekretaris/Subag dan Kabid untuk rapat pembahasan Perjanjian Kinerja					Undangan rapat	30 Menit	Kesiapan hadir Draf PK siap	Buku Agenda
5.	Melaksanakan Rapat kerja penyusunan Perjanjian Kinerja					Notulen, dafdir, format PK	2 Jam	Draft Perjanjian kinerja sesuai kesepakatan	Daftar Penyusun PK (mandat)
6.	Menghimpun format data dan informasi Perjanjian Kinerja dari masing-masing Bidang, sekretariat, Subag dan Staf					Surat permintaan Bahan penyus PK	2 hari	Bahan penyusunan PK dan SKP (staf)	SOP Pengumpulan Data kinerja
7.	Menganalisis/Reviu kelengkapan data dan informasi atas Penyusunan PK sesuai Pedoman Reviu Penyusunan PK					Bahan penyusunan PK dan lampirannya	4 Hari	Bahan penyusunan PK dan lampirannya	Checklist kelengkapan dokumen/data/Informasi

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala Badan	Sekretaris	Kasubbag Program	Kabid/JFT/JFU/Subag/Staf	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Membuat Konsep Perjanjian Kinerja dan Lampirannya (berjenjang)					Bahan penyus PK dan Lampirn	2 Hari	Draf Perjanjian kinerja dan Lampirannya	Berlaku untuk Revisi PK
9.	Mengoreksi Konsep Dokumen Perjanjian Kinerja dan Lampirannya sesuai pedoman Penyusunan PK					RKT, Renja, DPA, Draf PK & Lam	1 Hari	Dokumen PK&Lampiran Telah direviu	Dibantu Tim Reviu PK
10.	Menyampaikan Dokumen Perjanjian Kinerja kepada Kaban untuk mendapat persetujuan					Dokumen PK dan lampiran Final	2 Jam	Dokumen PK& lampirannya disahkan	Pernyataan reviu dilampirkan
11.	Penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja oleh Kaban kemudian diteruskan ke Kasubbag Program					Dokumen PK disahkan	30 Menit	Dokumen PK siap didistribusikan	Indikator kinerja dan target jelas
12.	Menggandakan, mengantar kepada pemilik kinerja dan mengarsipkan Dokumen Perjanjian Kinerja					Dokumen PK didistribusi	60 Menit	Dokumen PK diteri & siap dilaksanakan	PK Es III dan IV sbg dasar menyusun SKP JF atau Staf sesuai Tusinya
13.	Selesai					Dokumen PK & lampiran diterima	-	pemegang mandat	




KEPALA BAPPEDA

AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si
NIP. 19730102 199803 1 008

LAMPIRAN I

NOTA DINAS SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KAPUAS HULU

NOMOR : 050/ /BAPPEDA/SET-A

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU</p>	Nomor SOP	050/ /BAPPEDA/SET-A
	Tanggal Pembuatan	29 April 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	30 April 2024
	Disahkan oleh	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nama SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Kepala : Eselon II.b, S1 – S2 diutamakan Ekonomi, Hukum, Teknik.	
2. Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mendukung kelancaran evaluasi internal SAKIP	2. Sekretaris : Eselon III.a, S1 – S2 diutamakan Ekonomi, Hukum, Teknik.	
	3. Ka. Subbag Perencanaan : S1 – S2 diutamakan Ekonomi, Hukum	
	4. Penyiap data : SMA, SMK diutamakan akuntansi, administrasi perkantoran, S1 diutamakan Ekonomi, Hukum	
	Peralatan/Perlengkapan	
	1. Renja/Renstra	
	2. RKA/DPA	
	3. Laporan Keuangan	
	4. Penetapan Kinerja BAPPEDA	
	5. Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan	
	6. Alat Tulis Kantor / Komputer/Laptop	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika prosedur ini tidak dilakukan maka Penilaian SAKIP tidak bisa dilaksanakan.	dilaporkan dalam bentuk Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev).	

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu
Sekretaris,



DE DEDI, S.T., M.T.

NIP. 19750506 200401 1 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) & PK ESELON

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		KABAN/SEKBAN	MUTU BAKU			KET
		PROGRAM	BIDANG/SEKRETARIAT		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Subbag Program Menyampaikan Nota Dinas dan file Pengukuran Kinerja (Kurkin) melalui web dengan cara mengupload kurkin tsb; masing-masing Bidang mengunduh kurkin tersebut, kemudian Bidang mengisi kurkin tsb	Menyampaikan Nota Dinas/Kurkin	mengunduh kurkin tersebut, kemudian Bidang mengisi kurkin tsb		Nota Dinas, Kurkin, Renja/Renstra, RKA/DPA, Laporan Keuangan, Penetapan Kinerja BAPPEDA, Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan	30 menit		File Pengukuran Kinerja (Kurkin) diunduh melalui web dgn alamat : https://bappeda.kapuasulukab.go.id/
2	Bidang Menginput KURKIN yg sdh di upload oleh Subbag program melalui Portal/web		Menginput KURKIN		SDA	120 menit		
3	selanjutnya bidang mengirim kembali Kurkin yang telah diisi ke subbag Program melalui web / WA	kurkin yg tlah diisi oleh bidang	mengirim kembali Kurkin yang telah diisi ke subbag Program			30 menit		
4	Subbag Program melakukan perekapan atas kurkin yg sdh diisi oleh msg2 bidang		melakukan perekapan atas kurkin		SDA	30 menit		
5	Menyampaikan Undangan ke bidang dan Menyiapkan Dokumen Monitoring & Eluasi (MONEV)	undangan Doc monev & PK Eselon	Bidang Menerima Undangan	Proses Monitoring & Eluasi (MONEV)		120 menit		
6	Mengarsipkan dokumen hasil rapat Monitoring & Eluasi (MONEV)					10 menit		

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Kabupaten Kapuas Hulu



DEDY, S.T., M.T.
 NIP. 19750506 200401 1 001